

# **MELACAK AKAR PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA**

**Sagaf S. Pettalongi**  
bakungs67@yahoo.com  
IAIN Palu

## **Abstract**

The roots of Islamic education in Indonesia can be traced from the existence and role of Islamic education which have been acted before Indonesia's independence. Islamic education so that was born and developed until now, it has become an integral part of the national education system, because in the value of education and institutional Islam was born and developed before the establishment of the national education system. It appears from the role of madrasah or Islamic boarding schools in various regions in Indonesia. After independence and the national education system is established, Islamic education was later recognized as part of the sub-national education system. The enactment of Law No. 20 of 2003 on the national education system emphasized the existence of Islamic education as part of the national education Islamic education is not only a sub-national education system but has become part of the national education system.

*Keywords: Islamic Education, the National Education System*

## **Pendahuluan**

Pendidikan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa memegang peran penting dalam sebuah masyarakat yang dinamis sebab eksistensi dan perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan dinamika pendidikan yang terus maju termasuk pendidikan Islam. Kelangsungan pendidikan merupakan sebuah usaha untuk melestarikan dan menransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah salah satu bentuk manifestasi cita-cita

hidup Islam berfungsi untuk melestarikan, menanamkan serta menstransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi-pribadi dan generasi penerusnya agar nilai-nilai kultural religius yang di cita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat. Pendidikan Islam adalah bagian penting dari pendidikan nasional di Indonesia karena ia telah berkontribusi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter kuat.

Jika dilihat dari aspek kehidupan budaya manusia pendidikan Islam merupakan salah satu alat pembudayaan masyarakat. Sehingga peran-peran pendidikan mestinya dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial kepada titik optimal kemampuannya. Kondisi ideal ini mengharuskan untuk mempertegas kembali pola berfikir dan berbuat dalam pelaksanaan pendidikan Islam yakni diperlukan sebuah kerangka berfikir yang mengandung konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan Islam dalam *frame* negara Indonesia yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan nasional.

Menelusuri akar pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia secara historis keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua aspek, *pertama* dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia, *kedua* dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin Indonesia. Keduanya memiliki akar sejarah yang panjang sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang tercermin dalam dasar negara Republik Indonesia Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya penyusunan sistem pendidikan nasional harus mementingkan jati diri dan eksistensi masyarakat pada umumnya serta eksistensi umat Islam pada khususnya yang telah berkontribusi penting dalam proses perjuangan dan merebut kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh.

## **Sekilas Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia**

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam di Nusantara, beberapa data sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke VIII masehi.<sup>1</sup> Sumber sejarah lainnya menyebutkan kalau masuknya Islam di Indonesia pada abad XII masehi, alasannya karena adanya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia bernama Pasai yang berasal dari Persia.<sup>2</sup> Thomas W. Arnold seperti diungkapkan Pijper,<sup>3</sup> mengatakan bahwa Islam yang ada di pantai barat pulau Sumatera sebenarnya telah terdeteksi dengan ditemukannya suatu kelompok perkampungan orang-orang Arab di daerah Baros yang terletak antara Tapanuli dan Aceh. Sedangkan Moens, seorang sarjana Belanda menyebutkan bahwa kerajaan Pasee (Pasai) di Aceh pada sekitar abad ke V masehi sudah menjadi pusat perniagaan yang ramai antara India dan Tiongkok. Sedangkan Islam masuk di Tiongkok pada masa Dinasti Tang, dan pada abad ke VIII masehi bangsa Tiongkok sudah banyak yang memeluk Islam bahkan telah banyak yang menjadi khatib dan imam, sehingga jika dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di tengah perjalanan antara Timur Tengah dan Tiongkok tentu tidak dapat diragukan lagi kalau pada sekitar abad ke VIII masehi, sudah ada orang Arab Islam masuk ke Indonesia.<sup>4</sup>

Proses masuknya orang Arab Islam ke Indonesia dapat dipastikan berbarengan pula dengan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang disebarakan oleh kalangan Arab, sehingga pertumbuhan serta berkembang Islam bersamaan dengan proses interaksi orang Arab dengan masyarakat pribumi yang juga menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Proses interaksi dan

---

<sup>1</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta : Penerbit Panjimas, 1988) h. 98.

<sup>2</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Pendidikan dan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 37.

<sup>3</sup>G.F Pijper, *Fragmenta Islamica Studien Over het Islamisme in Nederlandsch Indie*, Penerjemah Tudjimah, (Jakarta : UI Press, 1987) h. 54.

<sup>4</sup>G.F. Pijper, *Ibid.*

sosialisasi orang Arab dengan masyarakat asli setempat di barengi pula dengan memperkenalkan ajaran Islam sehingga secara normatif telah berlangsung kegiatan pendidikan Islam melalui dakwah-dakwah terbatas.

Proses pendidikan Islam yang berlangsung secara terbatas telah menjadi tolak ukur bagaimana Islam dengan umatnya memainkan perannya dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat setempat. Sekaligus membuktikan bahwa kegiatan pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya mendasari pada makna pendidikan dalam arti sempit melainkan dalam arti yang lebih luas, yaitu pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai pembangunan karakter masyarakat dan nilai-nilai budaya Islam dalam berbagai kehidupan.

Melacak perkembangan pendidikan Islam di Indonesia baik aspek pemikiran, isi maupun pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya dapat dilacak dalam beberapa tahapan berikut ini, yaitu :

#### 1. Pendidikan Islam Sebelum Penjajahan Belanda

Pendidikan Islam pada masa ini muncul masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan tradisional karena bentuk pelaksanaannya berpindah-pindah tempat seperti di surau, langgar bahkan tidak jarang terlaksana di bawah-bawah pohon.

Sebelum munculnya sistem pendidikan pondok atau sistem pesantren pada beberapa daerah di Indonesia, sebenarnya sudah ada sistem pendidikan yang menyerupai sistem pendidikan pesantren misalnya di Jawa tengah, telah berjalan sistem pendidikan yang disebut sistem mandala. Sistem mandala adalah suatu sistem pendidikan dalam agama Budha dimana guru dan murid tinggal bersama-sama dalam satu kompleks untuk belajar ilmu agama Budha.<sup>5</sup> Siswa yang tinggal dan belajar di asrama bebas dari pungutan biaya hidup pemondokan umum. Mereka juga selalu terlibat dengan pekerjaan keasramahan yang umumnya milik sang guru. Sistem pendidikan semacam ini dalam institusi pendidikan Islam juga dapat di jumpai pada sistem pondok

---

<sup>5</sup>I Djumhur dan Danasuparta, I, Djumhur, dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung : CV Ilmu, 1987) h. 78.

pesantren yang masih tradisional.<sup>6</sup> Kemudian dalam proses selanjutnya pondok pesantren berkembang dan melembaga sebagai sebuah bentuk dan sistem pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam relatif lebih muda eksistensinya dibandingkan dengan pesantren. Madrasah lahir sekitar awal abad 20, seperti halnya pesantren madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Meskipun harus diakui bahwa masih ada problematika yang dihadapi pendidikan Islam yaitu masih lemahnya respon pendidikan Islam terhadap berbagai macam perubahan yang berlangsung dewasa ini.<sup>7</sup> Pembaharuan tersebut menurut Karl Sternbrink, meliputi tiga hal yakni :

- a. Usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren
  - b. Penyesuaian dengan sistem pendidikan barat
  - c. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan barat.<sup>8</sup>
2. Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Belanda

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda sudah banyak mendapatkan tekanan dari pemerintah Belanda. Politik pendidikan yang dijalankan Belanda sangat diskriminatif. Pemerintah Belanda memprioritaskan kepada putra-putri pejabat dan pembesar yang bekerja untuk pemerintahan Belanda. Sebaliknya membatasi pendidikan bagi masyarakat pribumi.<sup>9</sup> Pemerintah kolonial Belanda sangat khawatir jika pendidikan Islam seperti madrasah maupun pesantren akan melahirkan generasi yang menjadi penentang kekuasaan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha

---

<sup>6</sup>Zamakhshari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1984) h. 79.

<sup>7</sup>Muwahid Shulihan, Rekonstruksi Teori dan Praktek Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Lektur; Academic Journal for Islamic Education*, Vol. X No. 1 Januari-Juni 2004. h. 116.

<sup>8</sup>Karel A. Sternbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 2008) h. 95.

<sup>9</sup>Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta : P3ES, 2001) h. 102.

untuk mengkooptasi madrasah.<sup>10</sup> Pembatasan kebijakan kolonial Belanda yang diskriminatif tersebut misalnya dalam hal ruang gerak para guru madrasah wajib mempunyai izin dari pemerintah Belanda, di bidang kurikulum pelajaran yang diajarkan harus dilaporkan kepada penguasa.<sup>11</sup> Meskipun kebijakan pembatasan yang dilakukan mendapat reaksi penolakan dari kalangan muslim karena dapat membawa dampak kebodohan karena terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat. Namun disisi lain sikap diskriminatif itu justru semakin memperkuat keyakinan dan kepercayaan beragama bagi penduduk pribumi di satu pihak, sehingga semangat keberagamaannya semakin baik.

Lembaga pendidikan Islam yang terus mendapatkan tekanan dan pembatasan akses bagi masyarakat untuk memasuki pendidikan Islam dari pemerintah Belanda, namun pondok pesantren terus berkembang secara subur dan semakin diminati masyarakat dan merupakan pendidikan alternatif bagi masyarakat luas, khususnya umat Islam. Sehingga semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Islam justru semakin meningkat karena nasionalisme telah banyak dikobarkan oleh kaum santri untuk menentang penjajahan Belanda, sehingga kolonial juga sudah semakin bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat luas.

### 3. Pendidikan Islam Zaman Penjajahan Jepang.

Setelah Jepang menduduki Indonesia, pada awalnya pemerintahan Jepang menggunakan siasat untuk menempatkan diri seolah-olah sebagai pembela kepentingan umat Islam. Akan tetapi siasat Jepang itu dapat di ketahui oleh masyarakat Islam. Menurut Mahmud Yunus,<sup>12</sup> untuk mendekati umat Islam agar mendukung pemerintahannya, Jepang menempuh beberapa kebijakan antara lain:

1. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda disebut kantor *Voor Islamistische Saken* yang dipimpin oleh orang

---

<sup>10</sup>Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah dalam Pendidikan Agama, dalam *Lektur : Jurnal Pendidikan Islam, Journal for Islamic Education*, vol 13 nomor 2 tahun 2007, h. 204.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 2011) h. 65.

Orientalisten Belanda, dirubah oleh Jepang menjadi kantor Sumbi yang dipimpin oleh Ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang dan di daerah-daerah dibentuk pula Sumuka, semacam kantor cabang atau perwakilan.

2. Pondok pesantren yang berskala besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang.
3. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti, yang isinya identik dengan ajaran Islam
4. Selain itu pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda muslim.
5. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
6. Para ulama Islam yang bekerjasama dengan pemimpin nasionalis diizinkan membentuk Barisan Pembela Tanah Air (BPETA).
7. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Selain itu dibentuk pula badan-badan pertahanan rakyat seperti HEIHO, PETA, KEIBON, SEINAN dan sebagainya. Taktik dan strategi Jepang ini dimaksudkan agar kekuatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk mendukung kekuatan Jepang dalam upaya menguasai perang Asia Timur Raya.

Terbentuknya badan-badan pertahanan rakyat ternyata dengan sendirinya telah membawa dampak kepada pemuda dan pelajar, karena mereka diharuskan untuk mengikuti latihan militer, baris berbaris, bekerja bakti, sehingga dunia pendidikan secara umum terbengkalai. Hanya lembaga pendidikan Islam (madrasah, pondok pesantren) yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Namun secara umum lembaga pendidikan Islam tetap terbatas ruang geraknya karena selalu mendapat pengawasan dan tekanan dari pemerintahan Jepang. Namun demikian kondisi dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Jepang sedikit membaik dibandingkan pada masa Belanda karena

beberapa organisasi keagamaan Islam dapat berdiri pada masa Jepang.

#### 4. Pendidikan Islam Pada Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, secara kenegaraan bangsa Indonesia dapat menata sendiri aspek-aspek kebangsaannya termasuk pendidikan yang di dalamnya mempertegas sistem dan keberadaan pendidikan Islam sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren di akomodir sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan dan peran pendidikan Islam mulai ditata dan terus mendapat tempat yang setara dengan pendidikan umum lainnya. Bangsa Indonesia mulai menata secara institusional status dan kelembagaan pendidikan Islam yang pada masa penjajahan dirasakan banyak kendala yang dihadapi.

Saat berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Republik Indonesia (RI) terus membina pendidikan Islam. Wujud pembinaann itu secara formal kelembagaan dipercayakan kepada Departemen Agama (Depag) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dedikbud) menangani pendidikan umum. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan tersebut kemudian dikeluarkan peraturan bersama antara kedua departemen untuk mengelola pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Sedang pembinaan pendidikan Islam pada lembaga-lembaga keagamaan di tangani langsung oleh Departemen Agama.

Kebijakan ini tampaknya menjadi awal munculnya pengelolaan pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama dan pendidikan umum di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang masih berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam secara umum maupun kelembagaan terus mendapat perhatian dari berbagai pihak dan komponen bangsa. Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Tujuan pembangunan nasional tersebut relevan dengan semangat dari butir-butir Pancasila yakni sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna bahwa kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber segala sumber hukum. Dengan demikian penguatan peran dan mutu pendidikan Islam menjadi penting untuk terus ditingkatkan agar mutu dan semangat dalam beragama serta pengamalan ajaran agama masyarakat semakin baik.

Beberapa catatan sejarah yang dikemukakan di atas jelas bahwa institusi pendidikan Islam yang muncul dan berkembang di tanah air telah ada sebelum masa penjajahan dan ia merupakan satu-satunya wahana pendidikan yang representatif bagi masyarakat umum terutama masyarakat Islam, yang menempati posisi mayoritas pada hampir semua wilayah Indonesia.

Keberadaan institusi pendidikan Islam yang telah muncul dan berkembang sejak masa kolonial yang terus bertahan bahkan berkembang sampai negara Indonesia merdeka, menjadi sebuah argumentasi logis manakala dinyatakan bahwa institusi pendidikan Islam yang telah berjalan di Indonesia sebelum lahirnya negara merdeka adalah merupakan embrio dan bagian penting dari sebuah sistem pendidikan nasional di Indonesia.

### **Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional**

Pembahasan terdahulu telah dikemukakan bahwa awal munculnya pendidikan Islam di Indonesia teroperasionalisasi pada tempat-tempat seperti surau, langgar, masjid atau bahkan serambi rumah sang guru khususnya kiyai. Para murid baik besar maupun kecil berkumpul sambil duduk di lantai menghadap guru. Waktu mengajar biasanya dilaksanakan pada petang atau malam hari, sebab pada waktu siangnya anak-anak membantu orang tuanya bekerja, sedangkan sang guru juga bekerja mencari nafkah keluarganya. Pelaksanaan pendidikan agama pada peserta didik tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari bagi orang tuanya, dan waktu bermain anak-anak maupun bagi guru sendiri. Itulah sebabnya pelajaran agama Islam mendapat dukungan dari orang

tua dan guru, bahkan dari seluruh masyarakat kampung dari setiap desa.<sup>13</sup>

Setelah pemerintah Belanda berkuasa di Indonesia dengan memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih moderen, institusi pendidikan Islam dalam bentuk surau, langgar dan semacamnya mulai dibenahi dan disempurnakan sampai kemudian berbentuk madrasah, pondok pesantren dengan sistem klasikal.<sup>14</sup> Sarana belajarnya juga dilengkapi dengan kursi, meja bangku dan sebagainya. Perubahan sistem pendidikan di surau menjadi pondok pesantren kemudian madrasah adalah nantinya merupakan modal dasar dan modal awal dari pendidikan nasional yang akan disusun bangsa Indonesia yang sudah bersatu, merdeka, berdaulat secara penuh,<sup>15</sup> dalam satu sistem pendidikan nasional.

Harus diakui bahwa secara kelembagaan pondok pesantren sebagaimana dalam sejarahnya di atas memiliki peran sentral dalam pengembangan agama Islam di Nusantara.<sup>16</sup> Sebab baik secara konsepsional maupun historis, institusi pendidikan Islam seperti pondok pesantren merupakan wadah pertama bagi pendidikan masyarakat pribumi dalam mengakses pendidikan, begitu pula ketika munculnya kolonial, ia merupakan pendidikan alternatif bagi masyarakat awam khususnya di awal tahun 1900-an. Pada masa-masa itu pula telah menjamur pondok-pondok pesantren maupun institusi pendidikan Islam lainnya,<sup>17</sup> bahkan banyak tokoh-tokoh Islam telah dengan giat menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme kebangsaan melalui pendidikan.<sup>18</sup> Sedangkan upaya menumbuhkan kesadaran

---

<sup>13</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988) h. 123.

<sup>14</sup>Nurchalis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta : Paramadina, 2007) h. 78.

<sup>15</sup>Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta : rajawali Press, 2002) h. 43.

<sup>16</sup>Suwito NS, Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren, *Jurnal Edukasi; Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan*, Volume 6 Nomor 3 Juli-September 2008, h. 28-29.

<sup>17</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. h. 32.

<sup>18</sup>Zuchairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, 1992) h. 76.

nasionalisme kebangsaan seperti yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan Taman Sisiwanya baru mulai sekitar tahun 1921.<sup>19</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa jauh sebelum lahirnya Taman Siswa, pendidikan Islam telah melembaga dan menyatu dengan masyarakat Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan kalau sistem pendidikan Islam di Indonesia merupakan satu kesatuan dari sistem pendidikan nasional, paling tidak harus merupakan satu kesatuan dalam kerangka pendidikan nasional. Hal senada dinyatakan pula oleh Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional bahwa pendidikan Islam dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional.<sup>20</sup> Rumusan ini dipertegas kembali dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Konsep pendidikan nasional seperti dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa pendidikan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun manusia seutuhnya, sebab lima diantara delapan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai memiliki keterkaitan langsung dengan sikap dasar dan karakter manusia, sedangkan sumber utama dalam pendidikan karakter adalah bersumber dari nilai-nilai agama.

Nilai-nilai agama yang kemudian terwadahi dalam wujud pendidikan karakter umumnya ditemukan dilingkungan pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren, sebab melalui kedua lembaga tersebut peserta didik mulai usia dini sudah diajarkan untuk dapat bertindak jujur, adil, tenggang rasa, disiplin, mandiri

---

<sup>19</sup>Imam Barnadib, *Perbandingan Pendidikan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998) h, 21.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kerangka Dasar Pendidikan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 1988) h, 25.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Sistem Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Dirjen Bimarga Depag RI, 2004) h. 76.

dan bertanggung jawab. Penekanan nilai karakter ini tidak hanya secara teoritis tetapi lebih pada konsistensi antara teori dan praktiknya sehari-hari.<sup>22</sup>

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Agama bagi bangsa Indonesia merupakan modal dasar dan menjadi tenaga penggerak yang tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Oleh sebab itu dalam penjelasan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan agama diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. Bahkan pendidikan madrasah telah disamakan dan disetarakan kedudukannya dengan pendidikan umum baik dari segi jenjang maupun kurikulumnya. Bahkan dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah serta pengembangan potensi madrasah sehingga kelak dapat memiliki keunggulan kompetitif.<sup>23</sup> Dengan demikian tampak bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai dimensi pembangunan bangsa, dan secara berkala mutu madrasah terus mendapat perhatian dari pemerintah.

Beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa kehadiran institusi pendidikan Islam baik secara historis, maupun peran dan nilai-nilai yang diembannya dalam proses pendidikan dan penanaman nasionalisme kebangsaan, tampak kalau kehadirannya telah menjadi satu wahana penting dalam pendidikan yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk menolak kehadiran pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

---

<sup>22</sup>Sri Dewi Lisnawaty, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Moral Melalui Pembelajaran Terintegrasi", *Jurnal Ta'dieb- Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*. Volume 17 Nomor 10 April-September 2012, h. 872.

<sup>23</sup>Muhammad Nasir, Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah, *Hunafa-Jurnal Studia Islamika*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013, h. 4-5.

## **Penutup**

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia. Meskipun pendidikan Islam awalnya muncul dari kegiatan-kegiatan dakwah dari para mubaligh, baik pelaksanaannya di surau, langgar maupun di masjid-masjid sampai kemudian pendidikan Islam berbentuk sebuah institusi seperti sistem pondok pesantren maupun sistem madrasah.

Sejak berdiri pada masa kolonial Belanda kehadirannya sangat diminati masyarakat bahkan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang mula-mula dikenal masyarakat khususnya umat Islam lapisan bawah. Kontribusi pendidikan Islam yang cukup besar terhadap bangsa Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia serta dalam peletakan kerangka penyusunan sistem pendidikan nasional di Indonesia menjadi keniscayaan yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh terlupakan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Yunus, “Menggugat Peran Madrasah dalam Pendidikan Agama”, dalam *Lektur: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 13 nomor 2 tahun 2007.
- Aqib H.Suminto. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta : LP3ES, 1985.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kerangka Dasar Pendidikan Nasional Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 1988.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Sistem Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : Dirjen Bimarga Depag RI, 2004.
- Endang Saefuddin Anshari,. *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- G.F. Pijper, *Fragmenta Islamica Studien Over het Islamisme in Nederlandsch Indie*, penerjemah Tudjimah, Jakarta : UI Press, 1987.
- Imam Bernadib. *Pendidikan Perbandingan*, Jilid I, Jogjakarta : Andi offset, 1988
- I, Djumhur, dan H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan* , Bandung : CV Ilmu, 1987.
- Karel A. Sternbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, Jakarta : LP3ES, 2008.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 2011.
- Muhammad Nasir, “Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dalam Konteks Pendidikan Islam di Madrasah”, *Hunafa ; Jurnal Studia Islamika*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2013.
- Muwahid Shulihan, “Rekonstruksi Teori dan Praktek Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Lektur ; Academic Journal for Islamic Education*, Volume. X Nomor. 1 Januari-Juni 2004.

- Nurchalis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Proyek Pembinaan Depdikbud, *bulletin Pendidikan Guru*, tahun VIII, Nomor. 4,5,6 Juli 1984.
- Suwito NS, “Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren”, *Jurnal Edukasi ; Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan*, Volume 6 Nomor 3 Juli-September 2008.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : 2005.
- Sri Dewi Lisnawaty, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Moral Melalui Pembelajaran Terintegrasi”, *Jurnal Ta’dieb ; Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*. Volume 17 Nomor 10 April-September 2012.
- Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Pendidikan dan Umat Islam Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Zamahsyari Dhofier, *Z. Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES, 1984.
- Zuchairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 1992,